

RENCANA KERJA (RENJA)
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2019



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Syeh Nawawi Al Bantani Palima Serang Banten

**RENCANA KERJA (RENJA)
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2019**



**BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
BANTEN**

**JL. SYEH NAWAWI AL-BANTANI KP3B GEDUNG SKPD TERPADU LT. 6
CURUG – KOTA SERANG**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 merupakan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Banten Tahun 2019 meliputi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2017.

Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Banten Tahun 2019 sebagai salah satu bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Setda dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2019, untuk kemudian menjadi bahan/acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Biro Organisasi Setda Provinsi Banten Tahun 2019.

Pada Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019, Biro Organisasi Setda Provinsi Banten akan Melaksanakan 1 Urusan, 2 Program kegiatan, yaitu 1).Program Tata Kelola Pemerintahan 2). Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dengan 9 Kegiatan dengan rencana pagu anggaran sebesar Rp. 2.545.000.000,-

Demikian Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 ini semoga dapat memenuhi harapan dan dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi selanjutnya, serta tidak lupa kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2019.

Serang,

2018

KEPALA BIRO ORGANISASI,



Drs. H. DIAN WIRTADIPURA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620311 198503 1 019

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan Renja Biro Organisasi Tahun 2019	5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN BIRO ORGANISASI	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2017 dan Capaian Renstra	7
2.2 Evaluasi Hasil Renja SKPD s/d Triwulan II	7
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	18
3.1.1. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional	18
3.1.1.1 Arah Kebijakan Umum	18
3.1.1.2 Prioritas Nasional	21
3.1.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2019	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	28
3.3 Program dan Kegiatan	29
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kaidah Pelaksanaan	30
4.2 Penutup	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh mendorong partisipasi masyarakat. Renja merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, secara substansial adalah penerjemahan dari visi, misi dan Program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten saat ini adalah pelaksanaan renja tahun kedua dari Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Banten 2017-2022.

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang merupakan salah satu unsur Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan, tata laksana, analisis jabatan dan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, administrasi pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi (Perda Provinsi Banten No.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Biro Organisasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- A. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang organisasi, analisis jabatan dan kepegawaian, pengembangan sumberdaya manusia, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi;

- d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Sebagai bagian dari Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Biro Organisasi diharuskan menyusun serta melakukan Rencana Kerja Biro pada setiap tahun anggarannya. Rencana Kerja (RENJA) Biro Organisasi tersebut merupakan dokumen Perencanaan Biro untuk periode 1 (satu) tahun yang dibuat sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Setda Provinsi Banten, yang didalam penyusunannya mengacu kepada Renstra Sekretariat Daerah dan RPJMD Provinsi Banten sebagai pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - PD) merupakan rencana pelaksanaan kegiatan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Rancangan RENJA-PD Biro Organisasi disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), RENSTRA-PD SETDA.

Selain itu RENJA-PD juga merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA - PD), yang selanjutnya setelah tersusun RAPBD dan APBD dengan Peraturan Daerah maka akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA - PD) sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh PD yang bersangkutan.

Kejelasan dan logisnya kegiatan pada rencana kinerja dan alokasi biaya secara tepat dan terarah, harus tertuang dalam RENJA-PD, karena RENJA-PD dalam pelaksanaan program pembangunan daerah merupakan suatu dokumen pengantar terhadap penganggaran pembangunan daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik - 2 - Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, - 3 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2, Seri A);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 3).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;

18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Renja ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan Renja sebelumnya, dan renja disusun untuk menyesuaikan program dan kegiatan yang tertuang pada RKPD 2018, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan .

Tujuan

Renja disusun sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Banten Tahun 2019 ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang pengertian Renja PD, proses penyusunan Renja PD, dan mengemukakan keterkaitan Renja PD dengan Dokumen RKPD, dengan Renstra Setda, dengan Renja K/L dan serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Landasan hukum, penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

Maksud dan tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dan penyusunan Renja Biro Organisasi.

Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Biro Organisasi, serta garis besar isi dokumen.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD/ Biro Organisasi tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, memuat uraian kinerja pelayanan SKPD, permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD dan formulasi isu-isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Review terhadap rancangan awal RKPD, memuat uraian mengenai proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat, menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan usulan para pemangku kepentingan.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja PD yang memuat perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

Program dan kegiatan, memuat penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rakapitulasi program dan kegiatan, tabel rencana program dan kegiatan (perumusan program dan kegiatan).

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

Lampiran – Lampiran.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

BIRO ORGANISASI TAHUN 2017 DAN EVALUASI TAHUN 2018 SEMESTER I

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Tahun 2017

Dalam tahun 2017 Biro Organisasi Setda Provinsi Banten sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran PD (DPA-PD), memperoleh anggaran dari APBD Provinsi Banten dengan nilai sebesar **Rp 5.197.374.369,-**

Realisasi anggaran APBD Biro Organisasi tahun 2017 adalah sebesar **Rp 4.266.186.840,00** ,- atau sebesar 82,08 % dengan sisa anggaran sebesar **Rp 931.187.529,00**.

Lebih lanjut berdasarkan kinerja keuangan, maka Laporan realisasi anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	PROGRAM, KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN	
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%) (13):(6)
1	2	3	4	5	6	7
	PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH					
1	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DAN NERACA ASET PADA BIRO ORGANISASI	43.000.000,-	40.500.000,-	94,19	2.500.000,-	5,81
	1 PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN PAJAK	10.750.000,00	9.500.000,00	88,37	1.250.000,00	11,63
	2 PEMBINAAN INTERNAL TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2017	32.250.000,00	31.000.000,00	96,12	1.250.000,00	3,88
2	PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	109.500.000,-	105.250.000,-	96,12	4.250.000,-	3,88
	1 PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN	35.250.000,00	35.250.000,00	100,00	0,00	0,00
	2 PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	15.500.000,00	11.250.000,00	72,58	4.250.000,00	27,42
	3 PENYUSUNAN RENSTRA BIRO ORGANISASI	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00	0,00	0,00

	4	FORUM RENJA BIRO ORGANISASI	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00	0,00
	5	RAPAT KERJA ASOSIASI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00	0,00
		PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUS					
	3	PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADA BIRO ORGANISASI	528.050.000,-	344.966.000,-	65,33	183.084.000,-	34,67
	1	PENYEDIAAN JASA PERKANTORAN (HONORARIUM NON PNS)	54.000.000,00	46.800.000,00	86,67	7.200.000,00	13,33
	2	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR BIRO ORGANISASI	74.969.000,00	74.969.000,00	100,00	0,00	0,00
	3	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN BIRO ORGANISASI	180.093.000,00	67.428.000,00	37,44	112.665.000,00	62,56
	4	PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM	134.238.000,00	75.119.000,00	55,96	59.119.000,00	44,04
	5	BELANJA PROMOSI DAN PUBLIKASI	84.750.000,00	80.650.000,00	95,16	4.100.000,00	4,84
	4	PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEGAWAI SETDA DAN REFORMASI BIROKRASI	536.012.000	519.446.000	96,91	16.566.000	3,09
	1	PEMBINAAN DAN PENYUSUNA SKP DILINGKUNGAN SETDA PROVINSI BANTEN	32.972.000,00	32.972.000,00	100,00	0,00	0,00
	2	PEMBINAAN KESEGERAN JASMANI PEGAWAI SETDA PROVINSI BANTEN	75.600.000,00	73.440.000,00	97,14	2.160.000,00	2,86
	3	EVALUASI DAN PELAPORAN PENGELOLAAN ARSIP PEGAWAI SETDA PROVINSI BANTEN	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	100,00
	4	PENINGKATAN KAPASITAS PARATUR PEGAWAI SETDA PROVINSI BANTEN	149.740.000,00	149.740.000,00	100,00	0,00	0,00
	5	PEMBINAAN ROHANI PEGAWAI SETDA PROVINSI BANTEN	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	6	RAPAT KOORINASI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017	89.600.000,00	83.910.000,00	93,65	5.690.000,00	6,35
	8	PENYUSUNA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018-2023	98.370.000,00	96.269.000,00	97,86	2.101.000,00	2,14
	9	RAKOR PIMPINAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI PROVINSI BANTEN	76.430.000,00	71.115.000,00	93,05	5.315.000,00	6,95
	5	PENINGKATAN DAN PEMBINAAN BUDAYA KERJA APARATUR	249.682.000	173.836.000,-	69,62	75.846.000	30,38
	1	PENGAWASAN, PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DATA KEHADIRAN	216.000,00	216.000,00	100,00	0,00	0,00
	2	RAPAT KOORDINAS TENTANG BUDAYA KERJA APARATUR PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	48.682.000,00	48.682.000,00	100,00	0,00	0,00

	3	PENYUSUNAN RAPERGUB REWARD DAN PANISMENT APARATUR DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVISBI BANTEN	40.734.000,00	0,00	0,00	40.734.000,00	100,00
	4	RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN BUDAYA KERJA	60.050.000,00	52.500.000,00	87,43	7.550.000,00	12,57
	5	RAPAT KOORDINASI TEKNIS PENGEMBANGAN MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR	100.000.000,00	72.438.000,00	72,44	27.562.000,00	27,56
	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PERANGKAT DAERAH						
	6	PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH	496.380.000	492.834.000,00	99,29	3.546.000,00	0,71
	1	VALUASI KELEMBAGAAN 50 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN	139.684.000,00	138.384.000,00	99,07	1.300.000,00	0,93
	2	PENATAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	140.684.000,00	139.684.000,00	99,29	1.000.000,00	0,71
	3	LOKAKARYA PENATAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	37.212.000,00	36.566.000,00	98,26	646.000,00	1,74
	4	PENYUSUNAN RAPERGUB PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	78.800.000,00	78.800.000,00	100,00	0,00	0,00
	5	VERIFIKASI PERGUB PEMBENTUKAN UPT DAERAH	100.000.000,00	99.400.000,00	99,40	600.000,00	0,60
	7	PENATAAN KELEMBAGAAN LEMBAGA LAIN BAGIAN PERANGKAT DAERAH DAN PEMBINAAN DAN FASILITASI RAPERDA/PERDA OPD KAB/KOTA	485.545.000	330.017.000	67,97	155.528.000	32,03
	1	PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN DAN PERSETUJUAN RAPERDA PERANGKAT DAERAH DAN SOTK PD KAB/OTA	212.640.000,00	185.400.000,00	87,19	27.240.000,00	12,81
	2	RAKOR BIDANG KELEMBAGAAN SE PROVINSI BANTEN	185.645.000,00	144.617.000,00	77,90	41.028.000,00	22,10
	3	KAJIAN PENATAAN LEMBAGA TERTENTU SEBAGAI BAGIAN PERANGKAT DAERAH	87.260.000,00	0,00	0,00	87.260.000,00	100,00
	8	PENYUSUNAN KEBIJAKAN KETATALAKSANAAN	322.067.000	261.357.000,00	81,15	60.710.000,00	18,85
	1	PENYUSUNAN REVISI PERGUB TATA NASKAH DINAS	64.002.000,00	64.002.000,00	100,00	0,00	0,00
	2	PENYUSUNAN SOP SETDA PROVINSI BANTEN	94.475.000,00	73.725.000,00	78,04	20.750.000,00	21,96
	3	PENYUSUNAN REVISI PERGUB TENTANG SARANA DAN PRASARANA KERJA APARATUR PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	163.590.000,00	123.630.000,00	75,57	39.960.000,00	24,43
	9	PENATAAN ANALISA DAN FORMASI JABATAN PERANGKAT DAERAH	1.157.208.000	970.678.000	83,88	186.530.000	16,12

1	PENYUSUNAN RAPERGUB TTG ANALISA JABATAN PADA SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN (12 DINAS DAN INSPEKTORAT)	21.400.000,00	20.800.000,00	97,20	600.000,00	2,80
2	PENYUSUNAN RAPERGUB TTG ANALISA JABATAN PADA SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN (10 DINAS DAN SETWAN)	21.400.000,00	20.800.000,00	97,20	600.000,00	2,80
3	FINALISASI/PEMBAHASAN PERGUB TTG ANALISA JABATAN PADA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	205.650.000,00	198.400.000,00	96,47	7.250.000,00	33,88
4	PENYUSUNAN RAPERGUB TTG ANALISA JABATAN PADA SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVISI BANTEN (SETDA 9 BIRO)	24.000.000,00	20.800.000,00	86,67	3.200.000,00	1,56
5	PENYUSUNAN RAPERGUB TTG ANALISA BEBAN KERJA PADA SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVISI BANTEN (SETDA 9 BIRO)	24.000.000,00	23.500.000,00	97,92	500.000,00	2,08
6	PENYUSUNAN RAPERGUB TTG ANALISA BEBAN KERJA PADA SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVISI BANTEN (10 DINAS DAN SETWAN)	24.000.000,00	23.500.000,00	97,92	500.000,00	2,08
7	PENYUSUNAN RAPERGUB TTG ANALISA BEBAN KERJA PADA SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVISI BANTEN (12 DINAS DAN INSPEKTORAT)	24.000.000,00	23.500.000,00	97,92	500.000,00	2,08
8	FINALISASI/PEMBAHASAN PERGUB TTG ANALISA BEBAN KERJA PADA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	88.300.000,00	87.300.000,00	98,87	1.000.000,00	4,17
9	PENYUSUNAN URAIAN TUGAS UPT/BALAI (12 UPT/BALAI PADA DINAS/BADAN TAHAP I	21.400.000,00	20.325.000,00	94,98	1.075.000,00	1,22
10	PENYUSUNAN URAIAN TUGAS UPT/BALAI (12 UPT/BALAI PADA DINAS/BADAN TAHAP II	21.400.000,00	20.325.000,00	94,98	1.075.000,00	1,22
11	PENYUSUNAN URAIAN TUGAS UPT/BALAI (12 UPT/BALAI PADA DINAS/BADAN TAHAP III	21.400.000,00	20.325.000,00	94,98	1.075.000,00	5,02
12	FINALISASI PEMBAHASAN URAIAN TUGAS UPT/BALAI PADA DINAS/BADAN	68.850.000,00	57.903.000,00	84,10	10.947.000,00	51,15
13	PENYUSUNAN STADAR KOMPETENSI TEKNIS PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN UNTUK BIRO HUKUM AN BIRO PERLENGKAPAN AN ASET	10.364.000,00	0,00	0,00	10.364.000,00	48,43
14	PENYUSUNAN STADAR KOMPETENSI TEKNIS PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN UNTUK ST POLPP, BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DAN BKPMPT	8.864.000,00	0,00	0,00	8.864.000,00	12,87

	15	PENYUSUNAN STADAR KOMPETENSI TEKNIS PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN UNTUK BPPMD DAN KTR PENGHUBUNG	8.870.000,00	0,00	0,00	8.870.000,00	85,58
	16	PENYUSUNAN STADAR KOMPETENSI TEKNIS PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN UNTUK BIRO PEMERINTAHAN DAN BIRO UMUM	8.840.000,00	0,00	0,00	8.840.000,00	99,73
	17	PENYUSUNAN STADAR KOMPETENSI TEKNIS PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN UNTUK BIRO HUMAS DAN PROTOKOL DAN BIRO ORGANISASI	8.840.000,00	0,00	0,00	8.840.000,00	99,66
	18	PENYUSUNAN STADAR KOMPETENSI TEKNIS PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN UNTUK BIRO EKONOMI DAN PEMBANGUNAN DAN BIRO KESRA	8.840.000,00	0,00	0,00	8.840.000,00	100,00
	19	PEMBUATAN SISTEM APLIKASI STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL DAN BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL	100.490.000,00	0,00	0,00	100.490.000,00	100,00
	20	PEMUTAHIRAN PENYUSUNAN ANJAB DAN ABK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	326.800.000,00	323.700.000,00	99,05	3.100.000,00	0,95
	21	PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	109.500.000,00	109.500.000,00	100,00	0,00	0,00
10	KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN KELUAR DAERAH PADA BIRO ORGANISASI		485.996.369	348.482.840,00	71,70	137.513.529	28,30
	1	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	92.817.250,00	66.976.000,00	72,16	25.841.250,00	27,84
	2	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH	393.179.119,00	281.506.840,00	71,60	111.672.279,00	28,40
11	PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KUALLITAS PELAYANAN PUBLIK		291.776.000,00	250.262.000,00	85,77	41.514.000	14,23
	1	PEMBINAAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PELAYANAN DI PROVINSI BANTEN	60.240.000,00	60.240.000,00	100,00	0,00	0,00
	2	PEMBINAAN DAN PENINGKATAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK	62.906.000,00	62.906.000,00	100,00	0,00	0,00
	3	RAKOR HASIL EVALUASI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PROVINSI DAN KAB/KOTA	40.253.000,00	40.253.000,00	100,00	0,00	0,00
	4	PEMBINAAN DAN EVALUASI HASIL PENILAIAN KINERJA PENYELENGGARA PELAYANAN	50.080.000,00	34.723.000,00	69,34	15.357.000,00	30,66
	5	PENYUSUNAN HASIL EVALUASI DAN LAPORAN SPM PROVINSI DAN KAB/KOTA	35.760.000,00	28.110.000,00	78,61	7.650.000,00	21,39

	6	RAKOR PELAKSANAAN KOMPETENSI INOVASI PELAYANAN PUBLIK	42.537.000,00	24.030.000,00	56,49	18.507.000,00	43,51
12	PENYUSUNAN LAPAORAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PROVINSI BANTEN		433.470.000	371.620.000,00	85,73	61.850.000	14,27
	1	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PROVINSI BANTEN	160.480.000,00	160.480.000,00	100,00	0,00	0,00
	2	RAKOR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PROVINSI BANTEN	73.950.000,00	73.950.000,00	100,00	0,00	0,00
	3	PENYUSUNAN EVALUASI LAPORAN KINERJA PROVINSI BANTEN	43.600.000,00	0,00	0,00	43.600.000,00	100,00
	4	PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA SETDA PROVINSI BANTEN	19.750.000,00	15.250.000,00	77,22	4.500.000,00	22,78
	5	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SETDA PROVINSI BANTEN	16.250.000,00	6.000.000,00	36,92	10.250.000,00	63,08
	6	PENYUSUNAN RENCANA KEJA SETDA PROVINSI BANTEN	17.000.000,00	13.500.000,00	79,41	3.500.000,00	20,59
	7	FORUM RENJA SETDA PROVINSI BANTEN	102.440.000,00	102.440.000,00	100,00	0,00	0,00
	PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH						
13	PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN PADA BIRO ORGANISASI		58.688.000	56.938.000,00	97,02	1.750.000,00	2,98
	1	FORUM DATA	27.900.000,00	27.400.000,00	98,21	500.000,00	1,79
	2	PENYUSUNAN DATA DAN INDIKATOR KINERJA	12.178.000,00	11.928.000,00	97,95	250.000,00	2,05
	3	FASILITASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU	2.950.000,00	2.950.000,00	100,00	0,00	0,00
	4	PENYUSUNAN DATA PEMBANGUNAN	15.660.000,00	14.660.000,00	93,61	1.000.000,00	6,39
	JUMLAH		5.197.374.369,-	4.266.186.840,-	82,08	931.187.529,-	17,92

2.2 Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2018 Semester I

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018

No.	PROGRAM, KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN	
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM TATA KELOLA PEMRINTAHAN	988.020.500				
1	KEGIATAN TATA USAHA BIRO ORGANISASI	988.020.500	365.779.570	37,02	622.240.930	62,98
	1 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	27.386.000	21.960.000	80,19	5.426.000	19,81

	2	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	48.240.000	-	0,00	48.240.000	100,00
	3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	349.946.500	141.380.000	40,40	208.566.500	59,60
	4	Koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah	376.248.000	197.939.570	52,61	178.308.430	47,39
	5	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	186.200.000	4.500.000	2,42	181.700.000	97,58
II		PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN	1.731.417.500	527.265.000			
	2	KEGIATAN KELEMBAGAAN DAN PERANGKAT DAERAH	154.698.000	35.514.000	22,96	119.184.000	77,04
	1	Rapat Koordinasi Hasil Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	17.836.000	-	0,00	17.836.000	100,00
	2	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	38.514.000	35.514.000	92,21	3.000.000	7,79
	3	Penataan kelembagaan Perangkat Daerah	58.514.000	-	0,00	58.514.000	100,00
	4	Penyusunan Rapergub Perangkat Daerah	39.834.000	-	0,00	39.834.000	100,00
	3	KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN KELEMBAGAAN KAB/KOTA	141.643.000	26.264.000	18,54	115.379.000	81,46
	1	Pembinaan dan Pengendalian dan Persetujuan Raperda Perangkat Daerah dan SOTK pada Kab/Kota	74.028.000	26.264.000	35,48	47.764.000	64,52
	2	Rakor Bidang Kelembagaan Se-Provinsi Banten	50.015.000	-	0,00	50.015.000	100,00
	3	Penilaian Struktur Organisasi Budaya Organisasi, dan Inovasi Organisasi	17.600.000	-	0,00	17.600.000	100,00
	4	KEGIATAN ANALISA FORMASI JABATAN	200.000.000	31.500.000	15,75	168.500.000	84,25
	1	Penyusunan Uraian Tugas UPT/Balai	70.000.000	31.500.000	45,00	38.500.000	55,00

	2	Penyusunan Rapergub Tentang Analisa Jabatan pada UPT/Balai	69.500.000	-	0,00	69.500.000	100,00
	3	Penyusunan Rapergub Tentang Analisa Beban Kerja pada UPT Balai	60.500.000	-	0,00	60.500.000	100,00
5	KEGIATAN TATALAKSANA ORGANISASI		280.410.000	114.000.000	40,65	166.410.000	59,35
	1	Rakor Penyusunan Pergub Tentang SOP Dinas Di lingkungan Pemerintah Prov.Banten	49.374.000	40.374.000	81,77	9.000.000	18,23
	2	Penyusunan Rapergub Tentang SOP Dinas Provinsi Banten	45.800.000	34.800.000	75,98	11.000.000	24,02
	3	Lokakarya Pergub SOP Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten	47.826.000	38.826.000	81,18	9.000.000	18,82
	4	Rakor Penyusunan Pergub SOP Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten	46.890.000	-	0,00	46.890.000	100,00
	5	Penyusunan Pergub Tentang SOP Badan di Lingkungan Pemerintah Prov. Banten	45.260.000	-	0,00	45.260.000	100,00
	6	Lokakarya Pergub tentang SOP Badan di Lingkungan Pemerintah Prov. Banten	45.260.000	-	0,00	45.260.000	100,00
6	Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		250.000.000	93.090.000	37,24	156.910.000	62,76
	1	Rakor Bidang Pelayanan Publik se-Provinsi Banten	30.590.800	28.590.000	93,46	2.000.800	6,54
	2	Sosialisasi Survey kepuasan Masyarakat pada perangkat daerah di Kab/kota dan Provinsi Banten	29.054.800	24.554.000	84,51	4.500.800	15,49

	3	Survey indek kepuasan masyarakat ke penyelenggara pelayanan di Provinsi Banten	20.293.600	-	0,00	20.293.600	100,00
	4	Monitoring dan Evaluasi Capaian Penerapan SPM Provinsi dan Kab/Kota se- Provinsi Banten	23.869.600	-	0,00	23.869.600	100,00
	5	Rakor Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi banten	42.894.400	39.946.000	93,13	2.948.400	6,87
	6	Pembinaan, evaluasi dan penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik	42.495.800	-	0,00	42.495.800	100,00
	7	Penyusunan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) Perangkat Daerah di Provinsi Banten	60.801.000	-	0,00	60.801.000	100,00
7		Pelayanan Kepegawaian dilingkungan Setda	337.496.500	65.482.000	19,40	272.014.500	80,60
	1	Rapat Koordinasi Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018	75.563.000	-	0,00	75.563.000	100,00
	2	Rapat Koordinasi Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten	49.582.500	-	0,00	49.582.500	100,00
	3	Pembinaan Senam Kesegaran Jasmani Aparatur Setda Provinsi Banten	73.500.000	14.700.000	20,00	58.800.000	80,00
	4	Pembinaan Rohani Aparatur Setda Provinsi Banten	12.000.000	5.000.000	41,67	7.000.000	58,33
	5	Peningkatan Kapasitas Aparatur Setda Provinsi Banten	100.054.000	28.030.000	28,01	72.024.000	71,99

	6	Evaluasi dan pelaporan pengelolaan arsip kepegaaian Setda Provinsi Banten	6.600.000	2.000.000	30,30	4.600.000	69,70
	7	Pembinaan dan penyusunan SKP di lingkungan Setda Provinsi Banten	20.197.000	15.752.000	77,99	4.445.000	22,01
	8	Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan SDM Pemerintah Provinsi Banten	119.120.000	35.425.000	29,74	83.695.000	70,26
	1	Monitoring dan Evaluasi Budaya Kerja (Kab/Kota) Pemerintah Provinsi Banten	175.000	-	0,00	175.000	100,00
	2	Rapat koordinasi Pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Provinsi Banten	39.625.000	35.425.000	89,40	4.200.000	10,60
	3	Workshop Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Provinsi Banten	39.660.000	-	0,00	39.660.000	100,00
	4	Bintek Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Provinsi Banten	39.660.000	-	0,00	39.660.000	100,00
	9	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	248.050.000	125.990.000	50,79	122.060.000	49,21
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Provinsi Banten	95.250.000	49.500.000	51,97	45.750.000	48,03
	2	Rakor Penyusunan Laporan Kinerja Provinsi Banten	40.750.000	31.720.000	77,84	9.030.000	22,16
	3	Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja Provinsi Banten	22.450.000	-	0,00	22.450.000	100,00
	4	Penyusunan Laporan Kinerja Setda Provinsi	23.550.000	-	0,00	23.550.000	100,00

	Banten					
5	Penyusunan Rencana Kerja Setda Provinsi Banten	22.800.000	9.300.000	40,79	13.500.000	59,21
6	Forum Rencana Kerja Setda Provinsi Banten	43.250.000	35.470.000	82,01	7.780.000	17,99
		2.719.438.000	893.044.570	32,84	1.826.393.430	67,161

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional ini meliputi penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional 2015-2019, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2015-2025, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

3.1.1. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional

3.1.1.1. Arah Kebijakan Umum

VISI MISI PEMBANGUNAN

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

***“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”***

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai dalam pembangunan nasional 2015-2019 serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:

- a) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sector jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan perananUMKM dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.
- b) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan. Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antar-sektor dan antar-wilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

- c) **Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.** Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik), menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan, yang kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.
- d) **Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim.** Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- e) **Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.** Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.
- f) **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.** Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya

akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

g) **Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.**

Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

3.1.1.2 Prioritas Nasional

Sembilan Agenda Prioritas

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Prioritas 2: Tata Kelola Pemerintahan

. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur sistem pemerintahan daerah yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa kunci keberhasilan yang perlu menjadi fokus perhatian pembangunan dalam konteks implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah terkait peningkatan kapasitas kelembagaan, aparatur, dan keuangan pemerintah daerah.

SASARAN

Sasaran pengembangan tata kelola pemerintahan daerah pada tahun 2015-2019, meliputi:

- 1) Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah;
- 2) Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah; dan
- 3) Meningkatnya Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah.

Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah:

- a. Mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang efektif dan efisien;
- b. Meningkatkan kualitas penataan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

- c. Meningkatkan harmonisasi peraturan perundangan daerah dengan peraturan perundangan sektoral dan investasi;
 - d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama daerah serta kapasitas pemerintah daerah dalam kerjasama daerah;
 - e. Meningkatkan sinergi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah
 - f. Perbaiki pelayanan publik melalui implementasi SPM, PTSP, dan mendorong inovasi daerah;
 - g. Meningkatkan akuntabilitas dan tata pemerintahan; dan
 - h. Meningkatkan kapasitas DPRD dan manajemen pemilihan kepala daerah.
- 2) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah.
Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah:
- a. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur; dan
 - b. Mempercepat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah.
- 3) Peningkatan Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah. Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah:
- a. Meningkatkan Kemampuan Fiskal Daerah;
 - b. Meningkatkan Kualitas Belanja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Meningkatkan keterkaitan alokasi dana transfer dan pelayanan publik.

3.1.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2018

Prioritas Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022, yang terkait dengan Tupoksi Biro Organisasi Setda Provinsi Banten yaitu prioritas Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik dan bersih. Sedangkan Isu Strategis yang terkait dengan Biro Organisasi yaitu Isu Strategis : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2018 yaitu : Pematapan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Keterkaitan antara Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan 2018 yang terkait dengan Biro Organisasi Setda Provinsi Banten dijelaskan sebagai berikut:

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Sebagaimana yang telah di jelaskan pada Bab sebelumnya bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang memiliki fungsi perumusan kebijakan pimpinan yang akan dilaksanakan oleh unsur operasional (Dinas Teknis) dan unsur penunjang (Lembaga Teknis Daerah).

Saat ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih berpedoman pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Pelaksanaan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Permasalahan Umum

Dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral dan mengamanatkan dibentuknya organisasi perangkat daerah, serta berdasarkan hasil kajian dan evaluasi, terdapat beberapa satuan kerja perangkat daerah termasuk Sekretariat Daerah yang dianggap mendesak untuk dilakukan penataan kembali susunan organisasinya berdasarkan tingkat kebutuhan, karakteristik, kemampuan anggaran dan SDM aparatur, beban kerja. Secara garis besar dapat dipetakan permasalahan kelembagaan yang terjadi pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagai berikut :

a. Overload

Overload yang terjadi pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten disebabkan oleh ketidaksesuaian antara beban kerja dengan ketersediaan sumber daya aparatur, yaitu pada Biro Umum dan Perlengkapan, Biro Organisasi.

b. Overlapping Internal

Permasalahan overlapping internal terjadi karena kurangnya komunikasi kerja baik secara vertikal maupun horizontal, dan kekurangmampuan

pejabat tertentu dalam menyelesaikan permasalahan/tugas, yang menjadi tugas dan fungsinya, sehingga pimpinan memberikan tugas tersebut kepada pejabat lain yang dianggap mampu meskipun bukan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini akan menimbulkan permasalahan, tatkala tugas yang diberikan oleh pimpinan tersebut bersentuhan dengan penganggaran dan tanggung jawab sebagai pemegang jabatan tersebut.

c. **Overlapping Eksternal**

Overlapping eksternal disebabkan oleh tidak spesifiknya tugas pokok dan fungsi sehingga menimbulkan ketidakjelasan kewenangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam beberapa kegiatan terjadi tumpang tindih antara Dinas, LTD, dan Biro. Dalam konteks ini area kewenangan dalam hal koordinasi dan perumusan kebijakan yang sifatnya makro dan perumusan kebijakan teknis menjadi tidak jelas.

d. **Inkonsistensi Kewenangan**

Selain terjadi overlapping eksternal, terdapat pula permasalahan inkonsistensi kewenangan, disebabkan oleh tidak jelasnya tugas pokok dan fungsi dalam konteks kewenangan dimana terdapat urusan Pemerintah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

e. **Permasalahan Nomenklatur**

Terdapat nomenklatur jabatan yang sama pada antara Sekretariat Daerah dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program ataupun kegiatan, dan bahkan terdapat program dan kegiatan yang sama dilakukan oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Teknis lainnya yang disebabkan oleh kesamaan nomenklatur jabatan tersebut. Selain itu dapat dijumpai adanya penggunaan nomenklatur yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Seperti nomenklatur Bagian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan dan Subid Monitoring dan Evaluasi pada Bidang Pengendalian Program Pembangunan BAPPEDA, dan beberapa nomenklatur jabatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Biro perekonomian yang sama dengan beberapa dinas teknis.

f. Anggaran

Kurang seimbangnya antara beban tugas dan alokasi anggaran, serta dukungan sarana dan prasarana penunjang menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang menyebabkan menurunnya kinerja,

Strategi dalam Mewujudkan Misi “Meningkatkan Pelayanan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas, Budaya Kerja, dan Reformasi Birokrasi” adalah :

- Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Daerah dengan mengoptimalkan kelembagaan perangkat daerah dan ketatalaksanaan;
- Mengoptimalkan implementasi reformasi birokrasi yang mengoptimalkan kelembagaan perangkat daerah dan keatalaksanaan
- Mengoptimalkan implementasi e-goverment dengan parasarana teknologi informasi yang handal, sistem aplikasi yang efektif dan sumberdaya manusia yang kompeten.

Strategi “Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas daerah yang mengoptimalkan kelembagaan perangkat daerah dan ketatalaksanaan” ditempuh melalui :

- Mensinergikan kelembagaan perangkat daerah dengan indikator kinerja utama yang akan di capai dan membangun alur proses ketatalaksanaan untuk mencapai akuntabilitas kinerja yang ditargetkan.
- Melakukan Penataan Organisasi Tatalaksana, Pengelolaan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Perundang – Undangan, Budaya Kerja dan Pelayanan Publik untuk Implementasi Reformasi Birokrasi
- Pengelolaan Sarana prasarana teknologi informasi selaras dengan sistem aplikasi yang dibutuhkan seluruh perangkat daerah dalam melayani masyarakat menuju penggunaan e-government dalam peringkat baik.

Keterkaitan antara Isu Strategi dan Prioritas Pembangunan Tahun 2018 pada Biro Organisasi

No.	Isu Strategi 2018	Prioritas Pembangunan 2018	Keterangan
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan SKPD - Sistem Tata Kelola - Peningkatan Kualitas SDM Aparatur yang Profesional - Peningkatan Pelayanan Publik - Akuntabilitas - Budaya Kerja Aparatur /Pola Pikir

Untuk prioritas pembangunan pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah kemudian di implementasikan secara nyata melalui program prioritas dan target yang ada dalam RPJMD 2017-2022 dan Renstra Setda 2017-2022, dan dijelaskan dengan tabel sebagai berikut :

No	Prioritas Pembangunan	Urusan /Program	Indikator	Target 2018
1	2	3	4	5
1.	Administrasi Pemerintahan	Urusan Pememrintaha Fungsi Penunjang		
		Program Tata Kelola Pemerintahan	1 Nilai IKM	2,80
		Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Prosentasi OPD	30

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam mewujudkan visi Sekretariat Daerah yang berbunyi “*Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten menuju tata kelola pemerintahan yang baik*” dan melaksanakan misi Sekretariat Daerah, perlu dirumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis yang lebih operasional. Tujuan strategis organisasi merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode 1 - 5 tahun mendatang, agar diketahui apa yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki.

Sasaran harus bersifat lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan memiliki jangka waktu pelaksanaan. Oleh karena itu dalam menetapkan sasaran memerlukan indikator kinerja yang secara terperinci tujuan dan sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang handal, visioner, Profesional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Tujuan dari misi ini adalah untuk meningkatkan sumberdaya aparatur yang profesional kompeten dan akuntabel

Berdasarkan tujuan tersebut *sasaran* yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi.

- Misi 2 : Mewujudkan Sekretariat Daerah yang kuat dan fleksibel terhadap segala perubahan menuju reformasi birokrasi dalam bidang Tata Praja, Ekonomi dan Pembangunan, serta umum.

Tujuan misi kedua ini adalah Mengembangkan kelembagaan dan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel serta adaptabel untuk dapat menyesuaikan dengan segala perubahan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah :

Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.

- Misi 3 : Memberikan pelayanan yang berkualitas dibidang Tata Praja, Ekonomi dan Pembangunan, serta umum kepada semua pemangku kepentingan.

Tujuan dari misi ketiga ini adalah untuk meningkatkan pelayanan yang prima kepada pimpinan, aparatur, dan pemangku kepentingan berupa rumusan kebijakan fasilitasi administrasi, koordinasi sesuai ketentuan yang berlaku

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah :

1. Meningkatkan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;
2. Meningkatnya pembangunan sosial dan pembinaan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan
3. Meningkatkan pembangunan dan pembinaan hukum di daerah
4. Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan
5. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan uraian diatas tujuan dan sasaran Rencana Kerja Biro Organisasi sebagai berikut:

No.	Tujuan	Sasaran
1	2	3
1.	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompentensi serta melayani masyarkat	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan sekumpulan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Banten sesuai strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian visi dan misi. Sedangkan indikasi kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari beberapa kegiatan dengan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang ada baik berupa aparatur, dana, sarana dan prasarana untuk menghasilkan sesuatu berupa barang/jasa yang bersifat indikatif.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Tata Kelola Pemerintahan
- 2) Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Sedangkan rumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, adalah sebagai berikut:

- 1) Tata Usaha Biro Organisasi
- 2) Tatalaksana Organisasi
- 3) Kebijakan Pelayanan Publik
- 4) Kelembagaan dan Perangkat Daerah
- 5) Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kab/Kota
- 6) Analisa Formasi Jabatan
- 7) Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- 8) Pelayanan Kepegawaian di lingkungan Setda
- 9) Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Banten.

Tabel : Program dan Kegiatan Biro Organisasi Tahun 2018

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Tata Kelola Pemerintahan	1. Tata Usaha Biro Organisasi	
2.	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	1) Tata Usaha Biro Organisasi 2) Tatalaksana Organisasi 3) Kebijakan Pelayanan Publik 4) Kelembagaan dan Perangkat Daerah 5) Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kab/Kota 6) Analisa Formasi Jabatan 7) Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 8) Pelayanan Kepegawaian di lingkungan Setda 9) Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Banten.	

BAB IV PENUTUP

4.1. KAJIDAH PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

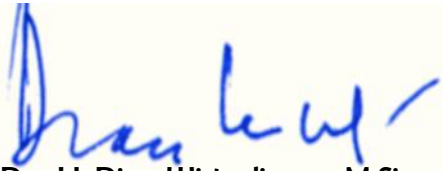
1. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten diupayakan secara optimal untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019 yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 yang telah diselaraskan dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten 2017 – 2022 dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022.
2. Selanjutnya Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2019, serta dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 tersebut dijadikan dasar untuk menyusun RKA dan DPA Tahun 2019.
3. Untuk efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten secara berkala melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap Rencana Kerja tersebut secara berkala baik triwulanan maupun semesteran.
4. Agar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan Baik dan tepat sasaran, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten harus melakukan Koordinasi dengan PD lainnya dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, dan Pemerintah Pusat.

4.2. PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2019 ini, memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2018 s/d semester I, tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Rencana kerja ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Banten Tahun 2019 ini akan dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan dan Staf berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Berhasil atau tidaknya suatu Rencana Kerja bukan hanya pada perumusannya saja, akan tetapi juga pada saat diimplementasikan oleh seluruh elemen/unsur Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Oleh karena itu, diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

KEPALA BIRO ORGANISASI



Drs. H. Dian Wirtadipura, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19620311 198503 1 019

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020 PROVINSI BANTEN

Biro Organisasi Setda Provinsi Banten

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	Adinistrasi Pemerintahan							
	PROGRAM TATA KELOLA PEMRINTAHAN							
	Kegiatan Tata Usaha Biro Organisasi				463.200.075			509.520.083
		1 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Prov. Banten	10 Dokumen	18.884.600		10 Dokumen	
		2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Prov. Banten	2 Dokumen	29.420.000		2 Dokumen	
		3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Prov. Banten	5 Dokumen	201.007.875		5 Dokumen	
		4 Koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Prov. Banten	2 Dokumen	150.637.600		2 Dokumen	
		5 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	Prov. Banten	4 Dokumen	63.250.000		4 Dokumen	
	PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN							
	Kegiatan Kelembagaan dan Perangkat Daerah				410.003.900			451.004.290
		1 Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Prov. Banten	1 Dokumen	90.650.000		1 Dokumen	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
		2 Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Prov. Banten	1 Dokumen	87.554.000		1 Dokumen	
		3 Perumusan Kebijakan Perangkat Daerah	Prov. Banten	1 Kegiatan	231.799.900		1 Kegiatan	
		Kegiatan Pembinaan dan pengendalian Kelembagaan Kab/Kota			262.322.450			288.554.695
		1 Pembinaan dan Pengendalian dan Persetujuan Raperda Perangkat Daerah dan SOTK pada Kab/Kota	Prov. Banten	1 Dokumen	59.631.400		1 Dokumen	
		2 Rakor Bidang Kelembagaan Se-Provinsi Banten	Prov. Banten	1 Kegiatan	40.618.450		1 Kegiatan	
		3 Penilaian Struktur Organisasi Budaya Organisasi, dan Inovasi Organisasi	Prov. Banten	1 Dokumen	162.072.600		1 Dokumen	
		Kegiatan Analisa Formasi Jabatan			333.140.000			366.454.000
		1 Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Prov. Banten	1 Dokumen	263.015.000		1 Dokumen	
		2 Penyusunan Evaluasi Jabatan	Prov. Banten	1 Dokumen	70.125.000		1 Dokumen	
		Kegiatan Tatalaksana Organisasi			191.945.500			211.140.050

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
		1 Sosialisasi Pergub no. 84 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Monev ke Pemerintah Kab/Kota terhadap pelaksanaan Pergub No. 84 Tahun 2017	Prov. Banten	1 Kegiatan	53.857.500		1 Kegiatan	
		2 Perumusan Kebijakan SOP Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten	Prov. Banten	1 Dokumen	138.088.000		1 Dokumen	
		Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			264.994.000			291.493.400
		1 Rakor Bidang Pelayanan Publik se-Provinsi Banten	Prov. Banten	1 Kegiatan	63.189.000		1 Kegiatan	
		2 Sosialisasi Survey kepuasan Masyarakat pada perangkat daerah di Kab/kota dan Provinsi Banten	Prov. Banten	1 Kegiatan	17.675.400		1 Kegiatan	
		3 Survey indek kepuasan masyarakat ke penyelenggara pelayanan di Provinsi Banten	Prov. Banten	1 Dokumen	20.220.000		1 Dokumen	
		4 Monitoring dan Evaluasi Capaian Penerapan SPM Provinsi dan Kab/Kota se-Provinsi Banten	Prov. Banten	1 Kegiatan	15.840.000		1 Kegiatan	
		5 Rakor Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi banten	Prov. Banten	1 Kegiatan	121.568.600		1 Kegiatan	
		6 Pembinaan, evaluasi dan penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik	Prov. Banten	1 Kegiatan	16.330.000		1 Kegiatan	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
		Penyusunan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) Perangkat Daerah di Provinsi Banten	Prov. Banten	1 Dokumen	10.171.000		1 Dokumen	
	<i>Pelayanan Kepegawaian dilingkungan Setda</i>				222.173.075			244.390.383
		1 Rapat Koordinasi Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018	Prov. Banten	50 Pegawai Setda	18.981.875		50 Pegawai Setda	
		2 Rapat Koordinasi Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten	Prov. Banten	103 Pegawai Setda	39.620.000		103 Pegawai Setda	
		3 Pembinaan Senam Kesegaran Jasmani Aparatur Stda Provinsi Banten	Prov. Banten	40 Pegawai Setda	5.001.800		40 Pegawai Setda	
		4 Pembinaan Rohani Aparatur Setda Provinsi Banten	Prov. Banten	1 Dokumen	58.069.600		1 Dokumen	
		5 Peningkatan Kapasitas Aparatur Setda Provinsi Banten	Prov. Banten	1 Dokumen	18.450.000		1 Dokumen	
		6 Evaluasi dan pelaporan pengelolaan arsip kepegawaian Setda Provinsi Banten	Prov. Banten	1 Dokumen	44.775.600		1 Dokumen	
		7 Pembinaan dan penyusunan SKP di lingkungan Setda Provinsi Banten	Prov. Banten	60 Pegawai Setda	37.274.200		60 Pegawai Setda	
	<i>Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan SDM Pemerintah Provinsi Banten</i>				92.226.000			101.448.600

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
		1 Monitoring dan Evaluasi Budaya Kerja (Kab/Kota) Pemerintah Provinsi Banten	Prov. Banten	1 Kegiatan	145.000		1 Kegiatan	
		2 Rapat koordinasi Pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Provinsi Banten	Prov. Banten	1 Kegiatan	35.567.000		1 Kegiatan	
		3 Workshop Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Provinsi Banten	Prov. Banten	1 Kegiatan	28.257.000		1 Kegiatan	
		4 Bintek Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Provinsi Banten	Prov. Banten	1 Kegiatan	28.257.000		1 Kegiatan	
		Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			304.995.000			335.494.500
		1 Penyusunan Laporan Kinerja Provinsi Banten	Prov. Banten	1 Dokumen	52.755.000		1 Dokumen	
		2 Rakor Penyusunan Laporan Kinerja Provinsi Banten	Prov. Banten	1 Kegiatan	36.295.000		1 Kegiatan	
		3 Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja Provinsi Banten	Prov. Banten	1 Kegiatan	16.125.000		1 Kegiatan	
		4 Penyusunan Laporan Kinerja Setda Provinsi Banten	Prov. Banten	1 Dokumen	16.000.000		1 Dokumen	
		5 Penyusunan Rencana Kerja Setda Provinsi Banten	Prov. Banten	1 Dokumen	28.680.000		1 Dokumen	
		6 Forum Rencana Kerja Setda Provinsi Banten	Prov. Banten	1 Dokumen	40.740.000		1 Dokumen	
		7 Rakor Peningkatan Kapasitas Penyusunan Laporan Kinerja Provinsi Banten	Prov. Banten	1 Dokumen	91.900.000		1 Dokumen	
		8 Perubahan Renstra Setda Tahun 2017/2022	Prov.	1 Kegiatan	22.500.000			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
			Banten					
					2.545.000.000			2.799.500.000

KEPALA BIRO ORGANISASI

Dr. H. Dian Wirtadipura, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620311 198503 1 019